

Hasil Penelitian

**IMPLEMENTASI CSR TERHADAP TINGKAT KESEJAHTRAAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU
TIMUR**

Disusun dan Diajukan Oleh

Ikhsan Jafar

Nomor Stambuk : 10564 016 30 12



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

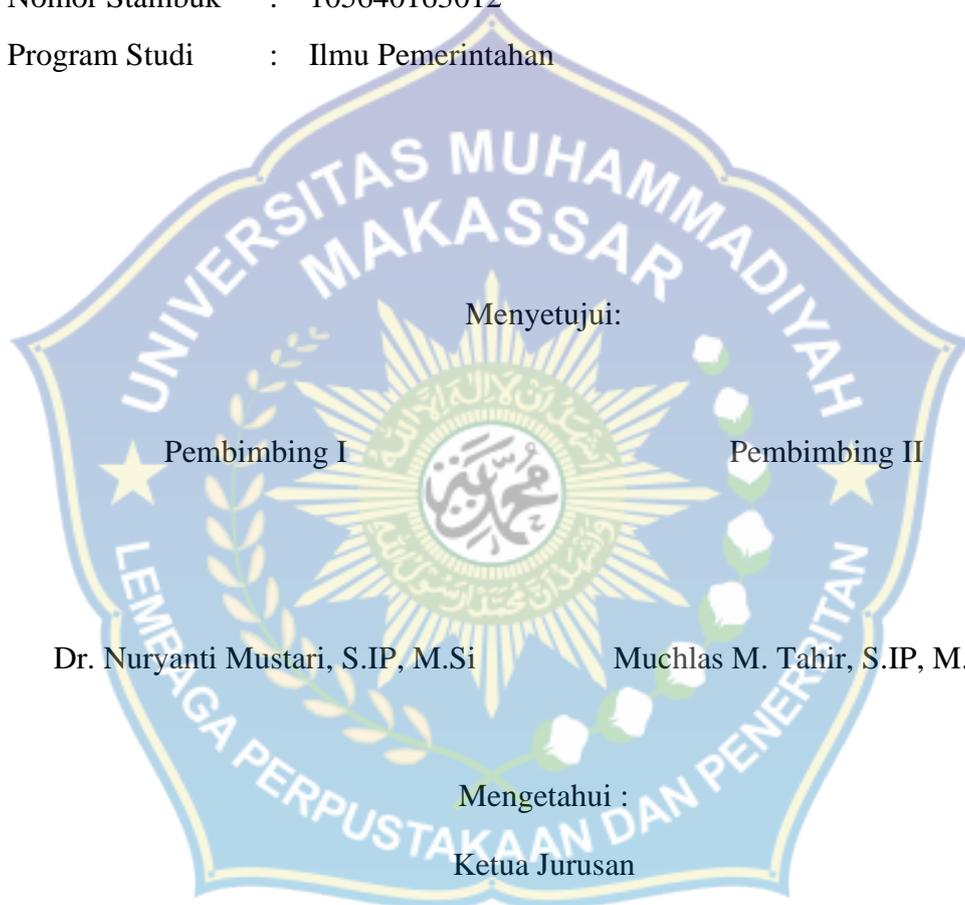
PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Implementasi CSR Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

Nama Mahasiswa : Ikhsan Fajar

Nomor Stambuk : 105640163012

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan

Fisipol Unismuh Makassar

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penulisan | 6 |
| D. Manfaat Penulisan | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| A. Good Governance | 8 |
| B. Prinsip Good Governance | 12 |
| C. Corporate Social Responsibility (CSR) | 15 |
| D. Manfaat CSR dan Tujuan CSR | 17 |
| E. Peraturan Dalam Pelaksanaan CSR | 18 |
| F. Kesejahteraan Masyarakat | 20 |
| G. Kontribusi CSR terhadap Kesejahteraan Masyarakat | 21 |
| H. Kerangka Pikir | 23 |
| I. Fokus Penelitian | 25 |

| | |
|---|----|
| BAB III METODE PENELITIAN | 27 |
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian | 27 |
| B. Jenis dan Tipe Penelitian | 27 |
| C. Sumber Data | 28 |
| D. Informan Penelitian | 29 |
| E. Teknik Pengumpulan data | 29 |
| F. Teknik analisis data | 30 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 33 |
| A. Deskripsi Objek Penelitian | 33 |
| B. Implementasi CSR Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur | 51 |
| BAB V PENUTUP | 65 |
| C. Kesimpulan | 65 |
| D. Saran | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | 68 |

ABSTRAK

Ikhsan Jafar, Implementasi CSR Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan Muchlas M tahir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi CSR Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi, penelitian yang dilakukan untuk mencari dan menyusun secara sistematis seluruh data yang diperoleh baik itu data hasil wawancara, catatan lapangan dan data-data lain yang sifatnya menunjang penelitian. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan dianalisa dengan menggunakan kegiatan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek layanan sosial terjadi perubahan orientasi program pada tahun 2013-2017 menitikberatkan pada tiga bidang yaitu pendidikan, kesehatan, dan perekonomian ketiga bidang tersebut dilaksanakan dengan berbagai program yang kongkrit dirasakan oleh masyarakat namun pada tahun 2018 terjadi perubahan orientasi dimana program CSR mengikuti program pemerintah melalui pembagian kawasan. Pada aspek Peningkatan Profit /Usaha Masyarakat menunjukkan bahwa pemberian keterampilan kepada masyarakat dilakukan dengan melibatkan lembaga karang taruna. Terdapat kegiatan budidaya tanaman herbal dengan pemberian bibit tanaman herbal yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat yang telah membudidayakannya. Pada aspek perbaikan lingkungan menunjukkan bahwa adanya kepedulian terhadap isu lingkungan salah satu caranya adalah memberikan Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB) dan pada tahun 2018 yang berorientasi pada kawasan sehingga pengelolaan lingkungan didasarkan pada kebutuhan kawasan seperti pembangunan apartemen ikan pada kawasan pesisir. Pada aspek upaya memperkecil konflik menunjukkan bahwa upaya untuk menekan konflik dilakukan dengan inisiatif yang cukup cepat hal ini dapat dilihat dari pembentukan tim khusus yang bertugas untuk meninjau lokasi dan melakukan pengosongan lahan sehingga proses selanjutnya adalah penyerahan lahan dari PT. Vale kepada pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk diserahkan kepada masyarakat. Pada aspek kegiatan budaya masyarakat menunjukkan terdapat upaya yang dilakukan PT Vale dalam mengadopsi kearifan lokal atau budaya setempat seperti pada desain TRWS yang menyerupai daun Welanreng hal ini menampilkan ikon lokal dan juga meluncurkan dua buku Cerita Rakyat yang memiliki pesan moral dan nilai budaya lokal.

Kata Kunci : Implementasi, CSR Kesehatan, Kesejahteraan, Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya *Good Governance* walaupun keadaan saat ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dari harapan. Dalam prinsip *Good Governance* kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. *Good governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang per orang atau kelompok tertentu. Sehingga dibutuhkan sinergitas antar setiap komponen.

Salah satu cara mewujudkan kerja sama (sinergitas) itu adalah melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Pada prinsipnya, CSR menekankan agar perusahaan tidak memposisikan diri sebagai menara gading dan institusi elitis yang mengisolir diri dari lingkungan sekitarnya. Padahal tanpa dukungan stakeholder eksistensi sebuah perusahaan tidak akan pernah terwujud. Mereka ada, tumbuh dan berkembang tidak lepas karena pengakuan dan daya dukung stakeholder yang mendukungnya, baik langsung maupun tidak langsung (Farida, 2014).

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya, melainkan sebagai sentra laba (profit center) dimasa yang akan datang. Dalam pandangan Islam, CSR merupakan kewajiban pengusaha yang dikeluarkan dari pendapatan yang jatuh pada kewajiban zakat, infaq, ataupun Sedekah (Alma, 2009). Dilihat dari implementasinya, perkembangan CSR di Indonesia masih membutuhkan banyak perhatian bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat luas dan perusahaan. Di antara ribuan perusahaan yang ada, diindikasikan belum semua perusahaan benar-benar menerapkan konsep CSR dalam kegiatan perusahaannya Mapisangka, (2009).

Sebagai salah satu elemen yang dapat menjadi faktor utama pembentuk modal sosial, perusahaan dengan program-program CSR-nya jelas tidak berdiri sendiri. Bagaimanapun, modal sosial tidak hanya dibentuk oleh faktor tunggal atau pelaku tunggal. Harus ada partisipasi aktif dari berbagai elemen lain yang keberadaannya mempengaruhi pembentukan dan pemupukan modal sosial tersebut. Kolaborasi sosial dari berbagai pihak yang terjadi secara simultan dan berkelanjutan akan memungkinkan terbentuknya modal sosial yang solid dan lestari. Oleh karena itu konsep CSR ini, tidak hanya melibatkan secara aktif pemerintah, tapi juga masyarakat. CSR secara tidak langsung membantu, bahkan memperkuat program-program pemerintah yang memiliki keterbatasan. Termasuk

yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Implementasi program CSR (*Corporate Relation Program*) merupakan realisasi dan aktualisasi dari upaya perusahaan untuk terus dekat dengan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran CSR dalam membentuk modal sosial dapat berlangsung secara efektif jika peran pemerintah untuk mempengaruhi secara positif tumbuhnya kepercayaan dan kolaborasi sosial dalam suatu komunitas atau hasil dari kolaborasi. Kerjasama ini dapat berkembang dengan baik dan akan mempercepat keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan sosial dan kesejahteraan.

Kepedulian sosial perusahaan merupakan kegiatan perusahaan yang membawa *dampak for better or worse*, bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders atau para pemegang saham, tetapi juga stakeholders, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan (Rahayu, 2014).

Salah satu bentuk kepedulian sosial perusahaan di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari program CSR yang dilaksanakan PT Vale di Luwu Timur diimplementasikan melalui Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM). Program ini telah dijalankan oleh PT Vale selama lima tahun, 2013-2017. PTPM merupakan payung program sosial PT Vale yang dijalankan dengan prinsip kemitraan, keberlanjutan, transparan dan akuntabel, keselarasan dengan rencana pembangunan daerah, serta keberpihakan pada masyarakat miskin dan rentan, demi mewujudkan kemandirian masyarakat.

PTPM PT Vale dibagi menjadi tiga program: Program Mitra Desa Mandiri (PMDM), Kemitraan Strategis, dan Kontribusi Strategis. Sepanjang 2016, PMDM menyentuh 35.517 penerima manfaat dari 38 desa di empat kecamatan terdampak operasi PT Vale. PMDM mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Satu Desa Satu PAUD, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar, dan menyalurkan bantuan kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah.

Program ini berkontribusi strategis dimana PT Vale memberikan donasi dan sponsorship dalam berbagai event kemasyarakatan. Perusahaan juga memberi bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam, baik di wilayah Luwu Timur maupun di wilayah lain di Indonesia. Menarik untuk melihat dari aspek penelitian tentang kejahatan masyarakat di Luwu Timur terkait kontribusi PT Vale di Wilayah tersebut.

Melalui Program Kemitraan Strategis, PT Vale bersama Pemkab Lutim mewujudkan Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB). Hingga kini sudah ada 109 petani yang membudidayakan padi organik di 7 kecamatan se-Luwu Timur dengan total area sawah 44,28 hektar. Bahkan padi dari Mahalona, Kecamatan Towuti, sudah mendapatkan sertifikat organik dari lembaga sertifikasi nasional INOFICE. Dalam kesempatan Rakor, PT Vale dan Pemkab menyerahkan sertifikat tersebut kepada AKAR Lutim. “PSRLB merupakan program CSR PT Vale yang paling berhasil. Sawah yang semula termasuk lahan kritis, berkat SRI Organik bisa berproduksi sampai 8 ton per hektar,” kata Aris Situmorang, yang juga merupakan Ketua Asosiasi Masyarakat Organik (AKAR) Luwu Timur. Selain itu, Kemitraan Strategis juga

memperkenalkan pengembangan dan pengolahan tanaman herbal demi menguatkan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM).

Namun hasil penelitian Zainuddin & Suhandani, (2015), menunjukkan sebuah fenomena bahwa pendapatan petani cukup rendah meraka harus menjadi buruh tani untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan pokoknya, jangankan berobat, menyekolahkan anak, atau membangun rumah. Kondisi ini didukung dengan data dari BPS Luwu Timur (2016), yang menunjukkan Jumlah penduduk miskin di Luwu Timur keadaan Maret 2016 berjumlah 21,08 ribu atau 7,52 persen dari total penduduk. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,34 poin persen atau sebesar 1,41 ribu jiwa jika dibandingkan kondisi Maret 2014 dengan angka kemiskinan pada tahun tersebut sebesar 7,18 persen. Jika dibandingkan selama enam tahun terakhir tahun 2011-2016, jumlah penduduk miskin jumlahnya berfluktuasi antar tahun. Pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur sekitar 20,40 ribu jiwa kemudian pada tahun 2012 turun menjadi 19,93 ribu jiwa. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 22,17 ribu jiwa, kemudian pada tahun berikutnya turun menjadi 20,78 ribu jiwa di tahun 2014 dan turun lagi menjadi 19,67 ribu jiwa di tahun 2015. Pada tahun 2016 angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 21,08 ribu jiwa.

Dari data yang dikemukakan dan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur masih menjadi masalah dalam pembangunan masyarakat oleh karena itu menarik melihat pengaruh PT. Vale dengan CSR yang dinilai mampu memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki dasar yang kuat berupa data

dan penelitian terdahulu yang menjadi pendukung sehingga dorongan untuk memperoleh jawaban apakah CSR ini memiliki peranan besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur merupakan hal menarik untuk dilakukan. Dengan demikian, penulis mengajukan sebuah judul proposal yang berjudul **“Implementasi CSR Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis menyimpulkan masalah yang akan penulis rumuskan yaitu Bagaimana Implementasi CSR Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur ?

C. Tujuan Penulisan

Searah dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi CSR Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

D. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis.

1. Aspek akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian ilmiah dan rujukan bagi penelitian berikutnya mengenai Implementasi CSR Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. Selain itu

penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu Pemerintahan khususnya bidang kerjasama CSR antara pemerintah dan swasta.

2. Aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dalam mencermati aspek kerjasama dalam CSR yang betul-betul memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Good Governance

Defenisi lain menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan social yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Defenisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari *terminology governance* membantah pemahaman formal tentang berkerjanya institusi-institusi negara. *Governance* mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang berkerja pada tingkat yang berbeda (Winarno, 2008).

Good Governance sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai adminstrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi Agent of change dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam Negara berkembang. Agent of change karena perubahan yang dikehendakinya, menjadi planned change (perubahan yang berencana), maka disebut juga Agent of Development. Agent of Development diartikan sebagai pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek, dan peran perencanaan dalam anggaran.

Menurut dokumen *United Nation Development Program* (UNDP, 2007), tata kelola pemerintahan yang baik adalah “Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya

dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat“. Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering di artikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Menurut Kooiman (Setyawan, 2004: 224) mengatakan *governance* merupakan serangkaian proses interaksi social politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka (Setyawan, 2004:12). Dalam konteks ini *governance* memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum.

Ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance* menurut Rosyada, dalam Setyono, (2015) yaitu:

1. Partisipasi (Participation) Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena tanpa partisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.
2. Penegakan hukum (Rule Of Law) Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.
3. Transparansi (Transparency) Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekocokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik dibidang kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.
4. Responsif (Responsiveness) Salah satu untuk menuju cita *good governance* adalah responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan, atasan juga harus bisa

memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai supervisor menunggu staf-staf menyampaikan keinginan-keinginannya. Supervisor harus bisa menganalisa kebutuhankebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan kepentingan bersama.

5. **Konsensus (Consensus Orientation)** Aspek fundamental untuk cita *good governance* adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.
6. **Kesetaraan dan keadilan (Equity)** Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.
7. **Efektifitas dan efisien** Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan

efisien dapat diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.

8. Akuntabilitas Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.
9. Visi Strategi (Strategic Vision) Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.

B. Prinsip Good Governance

Berdasarkan pengertian *good governance* oleh Mardiasmo (2009), negara perlu mewujudkan administrasi yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka menuntut penggunaan konsep *good governance* sebagai pemerintahan yang baik, relevan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Ide dasarnya sebagaimana disebutkan (Tingkilisan, 2005: 116) adalah bahwa negara merupakan institusi yang legal formal dan konstitusional yang menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi sebagai regulator maupun sebagai agent of change. Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa *good governance* awalnya digunakan

dalam dunia usaha dan adanya desakan untuk menyusun sebuah konsep dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan manajemen profesionalnya, maka ditetapkan *good corporate governance*. Sehingga dikenal prinsip-prinsip utama dalam governance korporat adalah: transparansi, akuntabilitas, fairness, responsibilitas, dan responsivitas. (Nugroho, 2009).

Transparansi merupakan keterbukaan, yakni adanya sebuah sistem yang memungkinkan terselenggaranya komunikasi internal dan eksternal dari korporasi. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban secara bertingkat keatas, dari organisasi manajemen paling bawah hingga dewan direksi, dan dari dewan direksi kepada dewan komisaris. Akuntabilitas secara luas diberikan oleh dewan komisaris kepada masyarakat.

Sedangkan akuntabilitas secara sempit dapat diartikan secara financial. Fairness agak sulit diterjemahkan karena menyangkut keadilan dalam konteks moral. Fairness lebih menyangkut moralitas dari organisasi bisnis dalam menjalankan hubungan bisnisnya, baik secara internal maupun eksternal. Responsibilitas adalah pertanggungjawaban korporat secara kebijakan. Dalam konteks ini, penilaian pertanggungjawaban lebih mengacu kepada etika korporat, termasuk dalam hal etika professional dan etika manajerial. Sementara itu komite governansi korporat di negara-negara maju menjabarkan prinsip governansi korporat menjadi lima kategori dalam (Nugroho, 2009), yaitu:

- (1) hak pemegang saham,
- (2) perlakuan yang fair bagi semua pemegang saham,
- (3) peranan konstituen dalam governansi korporat,

(4) pengungkapan dan transparansi dan

(5) tanggungjawab komisaris dan direksi.

Prinsip-prinsip *good governance* diatas cenderung kepada dunia usaha, sedangkan bagi suatu organisasi publik bahkan dalam skala negara prinsip-prinsip tersebut 16 lebih luas menurut UNDP melalui Lembaga Administrasi Negara yang dikutip Tingkilisan (2005: 115) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis konstruktif di antara negara, sektor swasta atau privat dan masyarakat yang disusun dalam empat pokok karakteristik *good governance*, yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*) Setiap warga negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun intermediasi institusi legitimasi yang mmewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Transparansi (*Transparency*) Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang mambutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
3. Keadilan Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan ataupun menjaga kesejahteraan mereka dan terlibat di dalam pemerintahan.
4. Akuntabilitas (*Accountability*) Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan 17 lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung

pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

C. Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah kesepakatan dari *World Summit on Sustainable Development (WSSD)* di Johannesburg Afrika Selatan 2002 yang ditujukan untuk mendorong seluruh perusahaan di dunia dalam rangka terciptanya suatu pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Peranan CSR dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan *good corporate governance, good corporate citizenship* dan *good business ethics* dari sebuah entitas bisnis (Mapisangka, 2009).

Menurut Hadi (2011:48) pengertian CSR adalah : CSR merupakan suatu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang disertai dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas. kegiatan CSR semata-mata merupakan komitmen perusahaan secara sukarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas dan bukan merupakan aktifitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundangundangan seperti kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Kata *discretionary* juga memberikan nuansa bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas CSR haruslah perusahaan yang telah menaati hukum dalam pelaksanaan bisnisnya (Solihin, 2008). tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dalam rangka mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat (Prastowo & Huda, 2011).

Prinsip utamanya adalah teori kontrak sosial menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari serangkaian kontrak implisit dan eksplisit antar individu, organisasi dan lembaga. Kontrak sosial adalah sebuah perjanjian antara rakyat dengan para pemimpinnya, atau antara manusia-manusia yang tergabung di dalam komunitas tertentu. Kontrak ini berkembang sehingga pertukaran dapat dibuat antar pihak dalam lingkungan yang harmonis, saling mempercayai, dan menggambarkan hasil atau *desired outcomes* (Nusantoro, 2017).

Selanjutnya dalam *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, sebagai komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Wibisono, 2007). Tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan (*triple bottom line*). Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Azheri (2011), Menyatakan bahwa terdapat 16 prinsip dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility*. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: (1) Prioritas perusahaan, (2) Manajemen terpadu, (3) Proses perbaikan, (4) Pendidikan karyawan, (5) Pengkajian, (6) Produk dan jasa, (7) Informasi public, (8) Fasilitas dan operasi, (9) Penelitian, (10) Prinsip pencegahan, (11) Kontraktor dan pemasok, (12) Siaga menghadapi darurat, (13) Transfer best practice, (14) Memberikan sumbangan, (15) Keterbukaan (disclosure), (16) Pencapaian dan pelaporan

D. Manfaat CSR dan Tujuan CSR

Menurut Lako (2011:95) komitmen perusahaan melaksanakan CSR secara berkelanjutan mendatangkan banyak manfaat, antara lain:

1. Sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan.
2. Memperkokoh kinerja keuangan perusahaan.
3. Meningkatnya akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas dan investor, kreditor, pemasok, konsumen, pemerintah dan masyarakat.
4. Meningkatnya komitmen, etos kerja, efisiensi dan produktivitas karyawan.
5. Menurunnya kerentanan gejolak sosial dan resistensi dari komunitas sekitarnya karena diperhatikan dan dihargai perusahaan.
6. Meningkatnya reputasi, goodwill dan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Resturiany (2011), menyebutkan bahwa tujuan perusahaan menerapkan CSR agar dapat memberi manfaat yang terbaik bagi stakeholders dengan cara memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika dan kebijakan. Adapun tanggung jawab yang dimaksud yaitu :

1. Tanggung jawab ekonomis. Kata kuncinya adalah: *make a profit*. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah pondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (*survive*) dan berkembang.
2. Tanggung jawab legal. Kata kuncinya: *obey the law*. Perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan fair. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya: *be ethical*.
4. Tanggung jawab filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Kata kuncinya: *be a good citizen*. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah *nonfiduciary responsibility*.

E. Peraturan Dalam Pelaksanaan CSR

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Dalam Peraturan Pemerintah ini, Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:

1. meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia;
2. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
3. menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai:

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.
3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
4. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
5. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
6. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
7. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

F. Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan akhir dari kebijakan dan kegiatan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi, yang berarti implementasi kebijakan dan perluasan kegiatan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru (Saputra & Mahmudi, 2016).

Menurut Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan masyarakat, memuat bahwa kesejahteraan masyarakat ialah suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya, sehingga mampu melakukan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan 14 kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup. Rhius (2015), mengemukakan indikator kersejahtraan masyarakat yaitu :

1. Kepentingan masyarakat
2. Kebutuhan terpenuhi
3. Kesatuan Sosial
4. Keamanan
5. Keselamatan

G. Kontribusi CSR terhadap Kesejahtraan Masyarakat

CSR akan lebih berdampak positif bagi masyarakat, ini akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah. Studi Bank Dunia (Fox & Howard, 2002) menunjukkan, peran pemerintah yang terkait dengan CSR meliputi pengembangan kebijakan yang menyetatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR,

menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi. Untuk Indonesia, bisa dibayangkan, pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*). Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain.

Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan ditujukan agar dapat meningkatkan peran perusahaan dalam komunitas sosial masyarakat. Hal ini menjadi penting, karena sebuah entitas bisnis keberadaan sebuah perusahaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dan suport dari masyarakat. Menurut Susanto (2009) perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya, dengan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yakni profit, lingkungan dan masyarakat.

Berdasarkan *International Business Leaders Forum* (IBLF) dalam Amri dan Sarosa (2008) ada 8 jenis kegiatan CSR yang membantu memperkuat kerekatan sosial, yaitu:

1. Membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup, dapat dilakukan misalnya dengan pengembangan usaha-usaha kecil yang berada disekitar lokasi perusahaan, termasuk membantu pemasaran bagi produk usaha kecil tersebut.
2. Membangun kepercayaan dan rasa saling menghormati, diwujudkan dengan mengembangkan aktivitas CSR yang mengarah pada terbentuknya kondisi keakraban antar anggota masyarakat.
3. Memperkecil konflik merupakan bentuk CSR yang paling dasar dan berperan besar dalam upaya penguatan kerekatan sosial.
4. Membantu mengatasi kriminalitas, dengan berupaya memberikan sentuhan pemberdayaan agar masyarakat sekitar tidak terjebak dalam hal yang negatif.
5. Mendukung *social local entrepreneurs*.
6. Penyediaan layanan sosial dalam situasi sulit, serta berkontribusi dalam pengembangan solidaritas sosial.
7. Mendorong toleransi antar agama, etnik, dll.
8. Mendukung kegiatan budaya dan pemeliharaan warisan budaya.

Dari pendapat Susanto (2009) dan IBLF (2008) dapat diperoleh pemahaman bahwa pencapaian pelaksanaan tanggung jawab CSR mencakup hal-hal berikut :

1. Penyediaan Layanan Sosial
2. Peningkatan Profit Masyarakat
3. Perbaikan Lingkungan
4. Memperkecil Konflik

5. Kegiatan budaya masyarakat

H. Kerangka Pikir

Program pengembangan masyarakat PT Vale kini diselaraskan dengan rencana pembangunan Pemerintah Daerah Luwu Timur, bersifat jangka panjang, dan memiliki roadmap lima tahunan. Pemda, Perusahaan, dan masyarakat penerima manfaat program akan berjalan bersama. Semua ini diwadahi dalam satu program yaitu Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) program tersebut termasuk sebagai CSR PT Vale. CSR ini, merupakan komitmen perusahaan secara sukarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menelusuri implemetasi CSR Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, maka akan ditelusuri dengan melihat indikator implementasi CSR (Susanto, 2009), yaitu Penyediaan Layanan Sosial, Peningkatan Profit Masyarakat, Perbaikan Lingkungan, Memperkecil Konflik, dan Kegiatan budaya masyarakat.

Bagan 1

Kerangka Pikir



I. Fokus Penelitian

Fokus penelitian untuk memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya interpretasi ganda atau tumpang tindih maka penelitian difokuskan pada:

1. Penyediaan layanan sosial, perhatian terhadap pelayanan sosial seperti bantuan terhadap masyarakat baik sarana maupun prasarana sosial kemasyarakatan.
2. Peningkatan Profit/usaha Masyarakat, upaya berupa dorongan bantuan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka.
3. Perbaikan Lingkungan, peran serta perusahaan dalam memberikan kontribusi berupa perbaikan lingkungan hidup masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan.
4. Memperkecil konflik, mengupayakan usaha meminimalisir konflik yang terjadi tengah masyarakat sehingga tercipta keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat.
5. Kegiatan budaya masyarakat, menunjukkan dorongan untuk melestarikan warisan budaya serta menjaga iklim budaya masyarakat yang telah mengakar pada masyarakat sehingga terbangun ikatan emosional antara perusahaan dan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini direncanakan dua (2) bulan setelah seminar proposal, lokasi penelitian adalah PT. Vale dan Badan Pemberdayaan Masyarakat karena ingin mengetahui lebih rinci Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) program tersebut termasuk sebagai CSR PT Vale. Kemudian untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat maka lokasi selanjutnya adalah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2012:6).

Adapun tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian fenomenologi, fenomenologi sering digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjukkan pada pengalaman subyektif dari berbagai jenis dan tipe subyek yang ditemui. Dalam arti yang lebih khusus, istilah ini mengacu pada penelitian terdisiplin tentang kesadaran dari perspektif pertama seseorang. Fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-

pengalaman subyektif manusia dan interpretasi terhadap suatu permasalahan atau fenomena (Moleong, 2012: 234).

C. Sumber Data

Menurut Lofland & Lofland (Moleong, 2012:157) sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis, melalui perekaman, pengambilan foto atau film. Secara umum sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu :

a. Data primer

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis, melalui perekaman, pengambilan foto atau film.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu diperoleh melalui sumber-sumber tertulis. Strategi ini dilakukan untuk dapat membangun sebuah abstraksi tentang tujuan penelitian yang didukung oleh data yang dikumpulkan dan saling berhubungan, sehingga sifat penyusunannya adalah dari kesimpulan umum ke khusus. Data sekunder diperoleh dari buku, dokumen pemerintah, dan literatur yang relevan dengan penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* Menurut Sugiyono (2013:218-219) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Adapun penentuan informan dapat dilihat pada tabel berikut:

| No. | Informan Penelitian | Jumlah/Org |
|----------------|---|------------|
| 1. | Kepala Divisi Public Relation PT. Vale | 1 |
| 2. | Staf Divisi Public Relation PT. Vale | 1 |
| 3. | Kasi Bidang Kesejahteraan Sosial Kecamatan Malili | 1 |
| 4. | Masyarakat Kecamatan Malili, Luwu Timur | 4 |
| Total informan | | 7 |

E. Teknik Pengumpulan data

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan data yang diperoleh secara langsung yang di sesuaikan dengan objek yang diteliti. Jenis *field research* yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dimana penulis terjun langsung mendatangi informan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Luwu Timur dan juga Pada PT. Vale serta Masyarakat Kecamatan Malili Luwu Timur.

- b. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari informan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan Baik pada pemerintah melalui DPMD , PT Vale, dan Masyarakat Kecamatan Malili Luwu Timur yang bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian ini terkait Impelementasi CSR terhadap kesejahtraan masyarakat Kecamatan Malili Luwu Timur.
- c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara melalui dokumen-dokumen tentang gejala atau fenomena yang akan diteliti di lapangan, dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan objek yang di teliti yaitu Impelementasi CSR terhadap kesejahtraan masyarakat Kecamatan Malili Luwu Timur.

F. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2011:244), mengemukakan bahwa analisis data proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data).

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Dalam reduksi data peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan diverifikasi oleh peneliti.

2. *Data Display* (Penyajian Data).

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penyajian data peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan/Verifikasi).

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam

pemikiran peneliti pada suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau melihat salinan suatu temuan yang disimpan dalam perangkat data yang lain.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Luwu Timur dan Mamuju Utara, pada tanggal 3 Mei 2003 ditetapkan sebagai hari jadi Luwu Timur. Malili adalah ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung utara Teluk Bone.

Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara. Secara definitif Kabupaten Luwu Timur yang beribukota di Malili terbentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2003 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 2003. Letak Kabupaten Luwu Timur pada Pulau Sulawesi sangat strategis dapat menjadi wilayah penghubung bagi wilayah *hinterland*, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang memiliki kekayaan sumberdaya alam. Pada masa datang, Kabupaten Luwu Timur diharapkan dapat berfungsi sebagai *service region* dan *marketing outlet* bagi kabupaten-kabupaten di sekitarnya.

Selain itu, bila ditinjau dari wilayah Nasional, di kabupaten Luwu Timur terdapat Kawasan Strategis Nasional, yaitu KSN Sorowako dan sekitarnya yang menjadi sentra penambangan PT. Vale Indonesia, Tbk. Penetapan KSN Sorowako mengacu pada pertimbangan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan

teknologi tinggi, serta mempunyai pengaruh luas terhadap pembangunan ekonomi sampai ke tingkat nasional, terutama karena Kontrak Karya (KK) yang ditanda tangani oleh Presiden RI (Soeharto, kala itu) baru berakhir tahun 2025.

Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar wilayahnya berada pada kawasan Pegunungan Verbeck merupakan daerah yang bertopografi pegunungan. Namun di beberapa tempat merupakan daerah pedataran hingga rawa-rawa. Wilayah-wilayah yang bergunung adalah bagian utara dan barat sedangkan wilayah pedataran adalah bagian selatan dan barat. Kondisi datar sampai landai terdapat pada semua wilayah kecamatan dengan yang terluas di Kecamatan Angkona, Burau, Wotu, Malili dan Mangkutana. Sedangkan kondisi bergelombang dan bergunung yang terluas di Kecamatan Nuha, Mangkutana dan Towuti.

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten dengan luas lahan hutan yang terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Luas lahan hutan alam dan hutan bakau mencapai 474.373 Ha atau mencapai 68,30%. Disektor pertambangan khususnya di bidang tambang Nikel memegang peranan penting di wilayah ini, luas lahan yang dikelola sebagai pertambangan mencapai 4,24% atau setara dengan 28.444,86 Ha dari luas lahan yang ada.

Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan yaitu Burau, Wotu, Tomoni, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Mangkutana, Kalaena, Tomoni Timur, dan Wasuponda dengan jumlah keseluruhan 124 desa, 3 kelurahan, dan 2 UPT.

Tabel 2. Nama, luas wilayah per kecamatan dan jumlah Desa/Kelurahan

| Nama Kecamatan | Jumlah Kelurahan /Desa | Luas Wilayah | | | |
|----------------|------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| | | Administrasi | | Terbangun | |
| | | (Ha) | (%) thd total | (Ha) | (%) thd total |
| Burau | 18 | 25.623 | 3.69 | 534.336 | 12.99 |
| Wotu | 16 | 13.052 | 1.88 | 449.526 | 10.93 |
| Tomoni | 13 | 23.009 | 3.31 | 404.184 | 9.82 |
| Tomoni Timur | 8 | 4.391 | 0.63 | 224.928 | 5.47 |
| Angkona | 10 | 14.724 | 2.12 | 391.974 | 9.53 |
| Malili | 21 | 92.120 | 13.26 | 463.122 | 11.26 |
| Towuti | 18 | 182.048 | 26.21 | 413.49 | 10.05 |
| Nuha | 5 | 80.827 | 11.64 | 354.882 | 8.63 |
| Wasuponda | 6 | 124.400 | 17.91 | 276.342 | 6.72 |
| Mangkutana | 11 | 130.096 | 18.73 | 421.74 | 10.52 |
| Kalaena | 7 | 4.198 | 0.60 | 179.652 | 4.37 |

Sumber: Luwu Timur dalam angka 2018

Sebaran desa di setiap kecamatan adalah Kecamatan Burau (18 desa), Wotu (16 desa), Tomoni (12 desa dan 1 kelurahan), Angkona (10 desa), Malili (14 desa, 1 kelurahan dan 2 UPT), Towuti (18 desa), Nuha (4 desa dan 1 kelurahan), Mangkutana (11 desa), Kalaena (7 desa), Tomoni Timur (8 desa) dan Wasuponda (6 desa).

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data desa tahun 2012 mencapai jumlah 269.734 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 63.068 rumah tangga. Rata-rata jumlah jiwa setiap rumah tangga sebanyak 4 jiwa. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Malili sebesar 37.656 jiwa kemudian Kecamatan Burau dengan 34.050 jiwa dan Kecamatan Towuti sebanyak 31.425 jiwa.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur Per Kecamatan

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | | | | |
|----|--------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Burau | 30.629 | 30.696 | 31.726 | 34.630 | 34.050 |
| 2 | Wotu | 28.594 | 28.405 | 29.153 | 29.658 | 29.952 |
| 3 | Tomoni | 21.569 | 21.773 | 22.972 | 23.418 | 23.363 |
| 4 | Tomoni Timur | 12.021 | 11.934 | 12.439 | 12.522 | 12.599 |
| 5 | Angkona | 22.727 | 22.377 | 24.344 | 24.792 | 24.814 |
| 6 | Malili | 31.323 | 31.775 | 33.386 | 36.625 | 37.656 |
| 7 | Towuti | 23.868 | 24.970 | 28.349 | 29.536 | 31.425 |
| 8 | Nuha | 21.397 | 21.005 | 25.532 | 23.052 | 23.429 |
| 9 | Wasuponda | 17.541 | 17.667 | 18.860 | 19.848 | 20.281 |
| 10 | Mangkutana | 20.697 | 20.412 | 20.601 | 21.288 | 21.059 |
| 11 | Kalaena | 11.252 | 11.039 | 11.211 | 11.163 | 11.108 |

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur, 2018

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, terlihat dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Luwu Timur sebesar 106,46 yang artinya setiap 100 perempuan di Luwu Timur terdapat sekitar 106,46 laki-laki. Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kecamatan Wasuponda yaitu sebesar 114,30 dan rasio jenis kelamin terendah di kecamatan Wotu yaitu 99,28.

2. Pendidikan

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan. Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam

pembangunan manusia, karena merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sangat konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya yang dilakukan meliputi perluasan dan pemerataan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Disamping itu dilakukannya sekolah gratis sampai dengan tingkat SMU.

Tabel 4. Jumlah Fasilitas Sekolah Kabupaten Luwu Timur Per Kecamatan

| Nama Kecamatan | Jumlah Fasilitas Pendidikan | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|-----|-----|---------|-------|-----|----|
| | Umum | | | | Agama | | |
| | SD | SMP | SMA | SM K | MI | MTs | MA |
| Burau | 16 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Wotu | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Tomoni | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tomoni Timur | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Angkona | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Malili | 21 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Towuti | 17 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Nuha | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wasuponda | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Mangkutana | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Kalaena | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |

Sumber : Luwu Timur dalam angka, 2018

Dari tabel terlihat untuk pendidikan dasar dan SMP 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur telah memiliki sekolah SD dan SMP. Selain itu, Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat dari persentase capaian indeks pendidikan yang merupakan gabungan dari dua indikator pendidikan yaitu Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, disamping itu keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan, juga dapat dijadikan sebagai salah

satu parameter untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dari beberapa indikator diantaranya, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, APM, APK, APS.

3. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Sebagai dampak dari tingginya laju inflasi tersebut tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan, sulitnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat dari tingginya harga kebutuhan sehari-hari tentunya akan berdampak sangat luas, untuk itu diperlukan perhatian khusus oleh pemerintah daerah guna mengatasi permasalahan tersebut.

Sampai dengan saat ini kinerja pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam penanggulangan kemiskinan menunjukkan capaian yang baik hal ini dibuktikan dengan menurunnya angka kemiskinan dari tahun-ke tahun dan telah dibawah angka target Nasional. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin sebesar 22.395 kemudian turun menjadi 20.401 atau berkurang sekitar 1.994 atau 8,9%. Demikian pula persentase penduduk di atas garis kemiskinan menunjukkan peningkatan dari tahun-ke tahun, pada tahun 2010 persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 90,82 % kemudian meningkat menjadi 91,71% pada tahun 2011 dan kembali meningkat lagi ditahun 2012 sebesar 92,29%, hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program yang mengarah kepada program penanggulangan kemiskinan sejauh ini telah sesuai dengan apa yang diharapkan dan menjadi ukuran bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan lagi kinerja penanggulangan

kemiskinan pada masa-masa yang akan datang sehingga menghasilkan output kinerja yang semakin membaik dari tahun – tahun.

Untuk Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur dapat diukur dari besarnya nilai PDRB atas dasar harga konstan yang berhasil diciptakan pada tahun sebelumnya. Namun ada hal yang sedikit berbeda antara PDRB Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten lainnya yang ada di propinsi Sulawesi Selatan dimana PDRB Kabupaten Luwu Timur di tinjau pada 2 hal yakni PDRB dengan pertambangan nikel dan PDRB tanpa tambang nikel. Hal tersebut diklasifikasikan demikian sebab sektor Pertambangan merupakan sektor yang sangat menentukan nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur hingga saat ini.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan (adhk) dengan Tambang Nikel terlihat lebih fluktuatif dari nilai atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2008, total nilai tambah bruto adhk di Luwu Timur mencapai 4,43 trilyun rupiah. Hingga pada tahun 2012, total nilai tambah bruto adhk seluruh sektor usaha meningkat 2,94 persen dari tahun 2011. Jumlahnya mencapai 4,76 trilyun rupiah. Fluktuasi pada PDRB harga berlaku dan harga konstan tersebut terutama dipengaruhi oleh naik turunnya harga nikel di pasar dunia dan produksi nikel dari PT. Vale Indonesia Tbk, perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia yang beroperasi di Luwu Timur.

4. Kecamatan Malili

Kecamatan Malili merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur dengan luas wilayah 921,20 km², kecamatan yang merupakan ibukota Kabupaten Luwu Timur. Secara astronomis, Kecamatan Malili terletak di

2°29'24" - 2°51'33" lintang selatan dan 120°57'16" - 121°22'46" bujur timur. Kecamatan Malili berbatasan dengan Kecamatan Nuha di sebelah utara, Kecamatan Nuha dan Towuti sebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone dan Propinsi Sulawesi Tenggara. dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Angkona dan Teluk Bone.

Kecamatan Malili terdiri dari 14 wilayah pedesaan dan 1 wilayah kelurahan yang seluruhnya berstatus definitif. Wilayah Kecamatan Malili merupakan wilayah bukan pantai. Dari 15 desa/kelurahan, hanya terdapat 2 desa yang merupakan wilayah pantai yaitu Desa Harapan dan Desa Lakawali Pantai. Secara topografi wilayah Kecamatan Malili merupakan daerah berbukit-bukit. Terdapat empat sungai yang mengalir Kecamatan ini yaitu sungai Lawape, sungai Malili, sungai Cerekang, dan sungai Pongkeru.

Sepanjang tahun 2016, curah hujan tertinggi di Kecamatan Malili terjadi pada bulan Maret dengan tingkat curah hujan 588 mm dan terjadi selama 29 hari di sepanjang bulan Maret. Sedangkan curah hujan terendah terjadi di bulan Juli dengan tingkat curah hujan 172 mm dan berlangsung selama 24 hari di sepanjang bulan Juli.

a. Pemerintahan

Pada tahun 2016 di Kecamatan Malili terdapat 50 dusun, 5 lingkungan dan 140 RT. Sebagai Pusat Pemerintahan, sebagian besar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur bertugas di Kecamatan Malili. Selain itu terdapat pula sebanyak 19 personil Polri yang siap memberi pelayanan.

Pada Tahun 2016 tercatat sebanyak 183 surat nikah dan 3 surat cerai yang telah dikeluarkan khusus untuk pemeluk Agama Islam. Dan tercatat pula 45 perkara pidana dimana yang terselesaikan sebanyak 20 perkara. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Kecamatan Malili pada tahun 2016 sebanyak 135 izin.

b. Penduduk

Kepadatan penduduk di Kecamatan Malili yaitu sekitar 43 jiwa per kilometer persegi. Desa yang terpadat penduduknya adalah Desa Manurung dengan kepadatan 723 jiwa per kilometer persegi, sedang paling rendah adalah Desa Laskap dengan kepadatan hanya sekitar 3 jiwa per kilometer persegi. Pada tahun 2016, jumlah penduduk di Kecamatan Malili sebanyak 39.766 jiwa yang terbagi ke dalam 10.127 rumah tangga, dengan rata-rata penduduk dalam satu rumah tangga sebanyak 4 jiwa.

Pada tahun yang sama jumlah laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Laki-laki sebanyak 20.451 jiwa dan perempuan sebanyak 19.315 jiwa, sehingga rasio jenis kelaminnya sebesar 105,882 yang artinya dari 100 wanita terdapat sekitar 105 laki-laki. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2015-2016 meningkat sebesar 2,26 persen.

c. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Malili relatif lengkap. Pada tahun 2016, jumlah TK di Kecamatan Malili sebanyak 25 unit, 27 unit SD, 9 unit SLTP dan 6 unit SLTA. Fasilitas pendidikan juga telah dilengkapi dengan perpustakaan sekolah. Jumlah perpustakaan untuk tingkat SD, SLTP dan SLTA masing-masing sebanyak 23 unit, 4 unit dan 2 unit perpustakaan.

Rasio murid guru memberikan gambaran rata-rata banyaknya murid yang diajar oleh seorang guru yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas guru dalam proses belajar mengajar. Tahun ajaran 2015/2016 rasio murid guru SD sebesar 22 siswa setiap guru untuk SD. Sedangkan untuk SLTP

dan SLTA sebesar 15 siswa setiap guru untuk jenjang pendidikan SLTP, dan 14 siswa setiap guru untuk jenjang pendidikan SLTA. Pada tahun ajaran 2015/2016 tingkat kelulusan untuk jenjang pendidikan SD mencapai 97,89 persen, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) SLTP mencapai 86,45 persen, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) mencapai 84,01 persen.

d. Kesehatan

Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Malili yaitu tiga buah puskesmas terletak di desa Puncak Indah , desa Pasi-pasi, dan desa Lakawali. selain itu terdapat 12 unit poskesdes, 30 unit posyandu, 4 tempat praktek dokter, dan 3 apotik. Selanjutnya, tenaga medis yang tersedia adalah 4 dokter umum, 3 dokter gigi, 2 apoteker, 32 bidan, dan 41 perawat dan 28 dukun tradisional.

Pada tahun 2016 tercatat sekitar 16 kelahiran yang ditangani oleh dokter dan 891 kelahiran yang ditangani oleh bidan, dimana tercatat 903 bayi lahir hidup dan 5 bayi lahir mati. Pengguna Akseptor KB pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 2,90 % dari tahun sebelumnya, dimana pengguna akseptor terbanyak berasal dari Desa Puncak Indah, dan suntik (injection) merupakan alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan.

e. Agama

Mayoritas penduduk Kecamatan Malili beragama Islam. Kondisi ini antara lain dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah bagi umat Islam seperti mesjid sebanyak 57 buah dan mushalah/langgar sebanyak 23 buah. Selain itu penduduk Kecamatan Malili terdapat komunitas masyarakat yang memeluk agama Kristen dan Hindu dengan jumlah tempat ibadah berupa gereja sebanyak 19 buah dan Pura 3 buah.

f. Sosial Lainnya

Penyebab terjadinya tindak kejahatan yaitu dikarenakan adanya niat dan kesempatan. Sebagai indikator keamanan, maka statistik kriminal perlu diamati dari waktu ke waktu, karena semakin tinggi frekuensi tindak kriminal akan merupakan ancaman yang serius terhadap keamanan dan ketertiban umum. Sampai dengan tahun 2016 terdapat 38 kasus kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Malili, sebesar 34% merupakan kasus perkelahian dan penganiayaan.

g. Perumahan Dan Lingkungan

Pada tahun 2016, bangunan rumah di kecamatan Malili umumnya merupakan rumah non-permanen dengan tingkat persentase sebesar 44,20%. Sedangkan untuk sumber air minum, sebagian besar masyarakat menggunakan ledeng atau air kemasan sebagai sumber air minum utama. Dan bahan bakar untuk Memasak Pada Umumnya Menjadikan Gas Sebagai Pilihan Utama.

h. Pertanian

Sebagian besar lahan sawah di Kecamatan Malili masih merupakan sawah tadah hujan dengan luas 804 hektar. Dan lahan kering umumnya digunakan sebagai lahan lainnya (tambak, kolam, empang,dll) dengan total luas sejumlah 4.568 hektar.

Pada tahun 2016, luas panen padi di Kecamatan Malili adalah 1.138 hektar yang menghasilkan produksi padi sebesar 6.112,9 ton, dengan tingkat produktivitas 53,72 kuintal/ha. Selain padi, Kecamatan Malili juga berpotensi menghasilkan jagung, kacang kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar.

i. Hortikultura

Pada sub sektor hortikultura jenis tanaman buah-buahan yang memiliki produksi paling banyak adalah buah pisang dengan jumlah produksi 1.255,2 ton, tanaman sayuran adalah terong dengan jumlah produksi 11,1 ton dan tanaman obat-obatan adalah jahe dengan produksi 368 kg.

j. Perkebunan

Sementara itu, di sub sektor perkebunan, Kecamatan Malili merupakan produsen kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan paling potensial dengan luas tanam sebesar 1.339,50 ha dengan produksi sebesar 15.896 ton selama tahun 2016.

k. Peternakan

Sapi potong merupakan ternak besar terbanyak yang terdapat di Kecamatan Malili, sebanyak 731 ekor, sedangkan kerbau sebanyak 75 ekor. Sementara itu, ternak kecil yang paling banyak adalah ternak kambing 663 ekor, kemudian babi sebanyak 387 ekor. Selanjutnya ternak unggas yang terbanyak adalah ayam pedaging sebanyak 272.149 ekor, dan ayam kampung sebanyak 26.479 ekor.

i. Perikanan

Kecamatan Malili adalah salah satu kecamatan yang berada di pesisir Teluk Bone, sehingga daerah ini berpotensi terhadap perikanan laut dengan total produksi

yang dihasilkan selama tahun 2016 sebanyak 4.316,2 ton ikan. Disamping perikanan laut daerah ini juga potensi terhadap budidaya ikan di areal tambak yang memproduksi ikan sebanyak 103.860 ton dan areal kolam sebanyak 21,53 ton.

l. Perindustrian

Pada tahun 2016, di Kecamatan Malili memiliki 375 usaha industri dengan jumlah tenaga kerja sebesar 827 orang. Usaha industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah usaha industri makanan dan minuman. Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan makanan dan minuman jadi menjadikan usaha ini masih optimis untuk tetap eksis.

m. Pertambangan Dan Energi

Kecamatan Malili memiliki potensi tambang dan penggalian yaitu batu/koral, pasir, dan tanah liat. Potensi penggalian batu/koral terdapat di Desa Puncak Indah, Baruga, Ussu, dan Atue. Sedangkan potensi penggalian pasir terdapat di Desa Pongkeru, Puncak Indah, Wewangriu dan Ussu. Dan potensi penggalian tanah liat terdapat di desa Pongkeru, Wewangriu dan Atue.

Rumah tangga pelanggan listrik PLN di Kecamatan Malili cukup besar sebanyak 8.107 rumah tangga yang tersebar di seluruh desa sedangkan pelanggan listrik Non-PLN sebanyak 785 rumah tangga.

j. Transportasi dan Komunikasi

Sarana transportasi darat sudah cukup memadai di Kecamatan Malili. Hal ini terlihat dari ketersediaan kendaraan umum penghubung antar desa yang masih didominasi oleh motor ojek. Ketersediaan pom bensin juga sudah dapat dinikmati

oleh masyarakat Kecamatan Malili. Selain itu tersedia pula sarana komunikasi berupa kantor pos pembantu di kelurahan Malili.

k. Perdagangan, Hotel Dan Restoran

Untuk menunjang kegiatan perekonomian penduduk Kecamatan Malili, sampai dengan tahun 2016 terdapat sebanyak 3 pasar, 16 minimarket, 19 kelompok pertokoan, 5 rumah makan/restoran, 159 warung makan/kedai makan minum dan ditunjang oleh 11 hotel/penginapan.

l. Keuangan

Pada tahun 2016 realisasi pendapatan asli daerah kecamatan Malili mencatat pencapaian lebih dari 342 juta rupiah atau sekitar 73,15% dari nilai yang ditargetkan. Dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tercatat 840 juta rupiah atau sekitar 93,21% dari target yang ditetapkan. Sementara itu Lembaga keuangan yang tersedia di Kecamatan Malili yaitu terdapat 8 unit bank dan 2 unit pegadaian dan 2 unit asuransi.

5. Gambaran Umum PT. Vale

PT Vale Indonesia Tbk, (Perseroan) didirikan pada tanggal 25 Juli 1968 dengan akta No. 49 tanggal 25 Juli 1968, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, notaris publik di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/59/18 tanggal 26 Juli 1968 dan diumumkan dalam Tambahan No. 93, Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 2 Agustus 1968.

PT Vale mempunyai sejarah yang membanggakan di Indonesia. Diawali dengan eksplorasi di wilayah Sulawesi bagian timur pada tahun 1920-an. Kegiatan

eksplorasi, kajian dan pengembangan tersebut terus dilanjutkan pada periode kemerdekaan dan selama masa kepemimpinan Presiden Soekarno.

PT Vale (yang saat itu bernama PT International Nickel Indonesia) didirikan pada bulan Juli 1968. Kemudian di tahun tersebut PT Vale dan Pemerintah Indonesia menandatangani Kontrak Karya (KK) yang merupakan lisensi dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi, penambangan dan pengolahan bijih nikel.

Sejak saat itu PT Vale memulai pembangunan smelter Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Melalui Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan yang ditandatangani pada bulan Januari 1996, KK tersebut telah diubah dan diperpanjang masa berlakunya hingga 28 Desember 2025. Pada bulan Oktober 2014, PT Vale dan Pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan setelah renegotiasi KK dan berubahnya beberapa ketentuan di dalamnya termasuk pelepasan areal KK menjadi seluas hampir 118.435 hektar.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir diubah dengan akta No.121 tanggal 29 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H., notaris publik di Jakarta tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 29 Juni 2015. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0938647.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015 dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHUAH.01.03-0948078 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015.

Entitas induk langsung Perseroan adalah Vale Canada Limited dan entitas pengendali utama adalah Vale S.A., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Federal Brasil. Di tahun 2014, PT Vale menjadi perusahaan pertama dan satu-satunya yang merampungkan amendemen Kontrak Karya (KK), sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Minerba tahun 2009. Dengan demikian, PT Vale telah memenuhi ketentuan undang-undang, dan menempatkan landasan regulasi yang stabil bagi masa depan Perseroan. Kini kami mengelola area Kontrak Karya seluas 118.439 hektar di Sorowako, Bahodopi (Sulawesi Tengah), dan Pomalaa (Sulawesi Tenggara).

Pabrik Perseroan berlokasi di Sorowako, Sulawesi Selatan dan kantor yang terdaftar berlokasi di The Energy Building, Lt. 31, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta. PT Vale mengoperasikan salah satu operasi tambang dan pengolahan nikel laterit terpadu terbesar di dunia yang berlokasi di dekat Sorowako di Pulau Sulawesi, Indonesia. Operasi bisnis kami terdiri dari penambangan dan pengolahan bijih menjadi produk nikel dalam matte, yaitu produk yang digunakan dalam pembuatan nikel rafinasi. Produksi kami pada tahun 2014 mencapai 78.726 ton nikel dalam matte. Ini merupakan produksi tertinggi yang pernah dicapai, melampaui rekor sebelumnya yaitu 76.727 ton pada tahun 2007.

Pabrik pengolahan kami di Sorowako memiliki tiga tanur pengering berbahan bakar minyak, lima tanur pereduksi berbahan bakar minyak, empat tanur listrik, dan tiga converter Pierce-Smith. Kami telah membangun dan memelihara infrastruktur pendukung yang mencakup fasilitas pelabuhan dan jalan untuk mengangkut dan mengapalkan produk akhir kami serta terminal bahan bakar minyak di Mangkasa Point. Kami juga memiliki dan mengoperasikan tiga fasilitas pembangkit listrik tenaga air dengan total kapasitas rata-rata 365 megawatt (MW).

Cadangan dan sumber daya nikel kami yang sangat baik, kami menyediakan pasokan jangka panjang yang handal ke konsumen nikel hilir, khususnya di Jepang, negara tujuan pengapalan kami. Semua produksi nikel dalam matte kami terikat dalam penjualan kepada Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co, Ltd (SMM), dimana perjanjian penjualan tersebut mengatur bahwa 80% dari produksi tahunan kami dibeli oleh VCL dan 20% lainnya oleh SMM berdasarkan formula harga LME.

dari program CSR yang dilaksanakan PT Vale di Luwu Timur diimplementasikan melalui Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM). Program ini telah dijalankan oleh PT Vale selama lima tahun, 2013-2017. PTPM merupakan payung program sosial PT Vale yang dijalankan dengan prinsip kemitraan, keberlanjutan, transparan dan akuntabel, keselarasan dengan rencana pembangunan daerah, serta keberpihakan pada masyarakat miskin dan rentan, demi mewujudkan kemandirian masyarakat.

Program CSR PT Vale dibagi menjadi tiga program: Program Mitra Desa Mandiri (PMDM), Kemitraan Strategis, dan Kontribusi Strategis. Sepanjang 2016, PMDM menyentuh 35.517 penerima manfaat dari 38 desa di empat kecamatan terdampak operasi PT Vale. PMDM mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Satu Desa Satu PAUD, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar, dan menyalurkan bantuan kepada pelaku UKM.

PT Vale memberikan donasi dan sponsorship dalam berbagai event kemasyarakatan. Perusahaan juga memberi bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam, baik di wilayah Luwu Timur maupun di wilayah lain di Indonesia. Menarik untuk melihat dari aspek penelitian tentang kejahatan masyarakat di luwu timur terkait kontribusi PT Vale di Wilayah tersebut.

Sejak tahun 2018, kami menjalankan pola dan skema Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) berbasis Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) di empat wilayah pemberdayaan kami di Blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

PPM berbasis PKPM merupakan program kemitraan antara masyarakat, Pemerintah Daerah, dan PT Vale dalam jangka waktu lima tahun (2018-2023). PT Vale melalui PPM-PKPM memberikan dana stimulan bagi masyarakat untuk pengembangan kawasan dan produk unggulan desa/produk unggulan kawasan.

B. Implementasi CSR Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

Untuk menelusuri implementasi CSR Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, maka akan ditelusuri dengan melihat indikator implementasi CSR yaitu Penyediaan Layanan Sosial, Peningkatan Profit Masyarakat, Perbaikan Lingkungan, Memperkecil Konflik, dan Kegiatan budaya masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Penyediaan Layanan Sosial

Untuk memberikan penjelasan mengenai implementasi CSR terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Malili khususnya pada aspek penyediaan layanan sosial maka dilakukan wawancara dengan informan Kepala Divisi Public Relation PT. Vale yang mengemukakan bahwa:

“Pada bidang kesehatan berfokus terutama pada kesehatan kerja dan pelayanan kesehatan pada masyarakat seperti Program pencegahan HIV/AIDS, yang dilakukan kira-kira itu sejak 2008 melalui Kelompok Kerja (Pokja) HIV/AIDS di RS INCO. Pelaksanaan program mencakup kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan kampanye pencegahan penularan dan penindakan HIV/AIDS di lingkungan PT Vale maupun masyarakat”
(Hasil wawancara Tanggal, 22 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat upaya pelayanan sosial yang secara khusus pada bidang kesehatan yaitu dengan dibentuknya kelompok kerja yang melaksanakan program yang mencakup sosialisasi, pelatihan, dan kampanye pencegahan penularan dan penindakan HIV/AIDS di lingkungan PT Vale secara khusus dan lingkungan masyarakat di Kecamatan Malili secara umum.

Selain itu dalam bidang kesehatan masyarakat CSR PT Vale juga mendukung program pemerintah, hal ini dikemukakan oleh informan Kasi Bidang Kesejahteraan Sosial Kecamatan Malili yang mengemukakan bahwa:

“ada juga Program seperti mendukung sarana dan prasarana Posyandu, Pustu dan PKM Peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar, peningkatan akses layanan kesehatan, hal ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dukungan terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan”
(Hasil wawancara Tanggal, 2 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa PT Vale mendukung pengembangan sarana kesehatan masyarakat antara lain Pustu (Puskesmas Pembantu dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang secara khusus bertujuan menjamin kesehatan masyarakat miskin di Kecamatan Malili. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan staf Divisi Public Relation PT. Vale yang mengemukakan bahwa:

“Pembangunan sarana dan prasarana pendukung PAUD dengan Perluasan akses layanan pendidikan, peningkatan mutu dan daya saing pendidikan. Kita berorientasi pada terpenuhinya Target one village one PAUD di 4 kecamatan pemberdayaan. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan sekolah PAUD yang telah ada”
(Hasil wawancara Tanggal, 22 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa layanan sosial dalam bidang pendidikan diperuntukan untuk PAUD (pendidikan anak usia dini) dimana target yang ingin dicapai adalah 1 desa satu PAUD pada 4 kecamatan pemberdayaan termasuk Kecamatan Malili.

Secara garis besar pelaksanaan CSR yang dilakukan pada periode 2013-2017 menitikberatkan pada program sementara pada 2018 menitikberatkan pada

pembagian Kawasan hal ini dikemukakan oleh informan oleh informan Kasi Bidang Kesejahteraan Sosial Kecamatan Malili yang mengemukakan bahwa:

“Untuk tahun 2013-2017 yang tadinya tiga bidang berubah menjadi sistem kawasan pesisir dan kawasan jasa dan perkotaan. Ada kelanjutan dengan priode sebelumnya melalui 3 program pendidikan kesehatan dan perekonomian sekarang sistem mengikuti programnya pemerintah kabupaten melalui pembinaan kawasan pelayanan jasa dan perkotaan dan kawasan pesisir”
(Hasil wawancara Tanggal, 23 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terjadi perubahan orientasi program pada tahun 2013-2017 menitikberatkan pada tiga bidang yaitu pendidikan, kesehatan, dan perekonomian namun pada tahun 2018 terjadi perubahan orientasi dimana program CSR mengikuti program pemerintah melalui pembagian kawasan yang terbagi dalam kawasan pelayanan jasa dan perkotaan dan kawasan pesisir. Oleh karena itu, diperlukan sudut pandang masyarakat untuk melihat pelaksanaan program pelayanan sosial yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai aspek pelayanan sosial dari program CSR maka dilakukan wawancara dengan informan masyarakat SS yang mengemukakan bahwa:

“sangat membantu masyarakat kalau memang ini dilanjutkan lagi agar semakin dimaksimalkan lagi oleh masyarakat kecil seperti kami dan ini sangat kami rasakan manfaatnya pendidikan juga bisa difasilitasi dengan baik saranannya”
(Hasil wawancara Tanggal, 4 Agustus 2019)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan masyarakat RA yang mengatakan bahwa:

“pelayanan sosial selain pemerintah bantuan dari PT. Vale juga dapat membantu meningkatkan pelayanan sosial disini tanggung jawab bersama tersebut menguntungkan masyarakat dan kami dapat menikmati pelayanan sosial ini dengan baik”

(Hasil wawancara Tanggal, 5 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat melalui sektor kesehatan dan pendidikan memberikan manfaat dan kemudahan kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Malili.

2. Peningkatan Profit /Usaha Masyarakat

Peningkatan Profit/usaha Masyarakat, upaya berupa dorongan bantuan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka. Untuk memperoleh gambaran mengenai upaya meningkatkan profit masyarakat maka dilakukan wawancara dengan informan Kasi Bidang Kesejahteraan Sosial Kecamatan Malili yang mengemukakan bahwa:

“yang dilakukan itu seperti pelatihan keterampilan bagi Karang Taruna, Sinergi dengan lembaga pemuda untuk peningkatan skill dan kecakapan hidup agar memudahkan dalam membuka lapangan kerja baru dan peningkatan taraf hidup bagi masyarakat”

(Hasil wawancara Tanggal, 22 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui pemberian keterampilan kepada masyarakat dilakukan dengan melibatkan lembaga karang taruna yang berperan meningkatkan skill dan kecakapan kewirausahaan pemuda dalam meningkatkan peluang memperoleh lapangan kerja khususnya bagi pemuda yang ada di Kecamatan Malili.

Kegiatan peningkatan usaha masyarakat juga didukung melalui CSR PT Vale hal ini diuraikan oleh informan Kepala Divisi Public Relation PT. Vale yang mengemukakan bahwa:

“Pada tahun 2015 dilakukan Budidaya tanaman herbal dan pelatihan penyehat tradisional, mencakup 40 warga binaan tersertifikasi sebagai penyehat tradisional dan 10 jenis minuman herbal produksi kelompok binaan yang sudah telah memiliki izin Dinkes (PIRT)”
(Hasil wawancara Tanggal, 23 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat kegiatan budidaya tanaman herbal yang diberikan pada 40 warga binaan yang memiliki 10 jenis minuman herbal produksi kelompok binaan yang memiliki izin merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui output program terhadap kesejahteraan masyarakat maka dilakukan wawancara dengan informan masyarakat LA di Kecamatan Malili yang mengemukakan bahwa:

“iya kemarin ini kita dibantu bibit sekarang sudah bisa kita jual diberbagai tempat herbal ini berkat kerjasama dengan PT Vale sehingga kita dapat berusaha dan jika perlu ditingkatkan lagi untuk berbagai jenis usaha dan juga akan muncul lagi pengusaha baru”
(Hasil wawancara Tanggal, 4 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa masyarakat memperoleh bantuan kewirausahaan yang secara konkrit diwujudkan dengan pemberian bibit tanaman herbal yang dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat yang telah membudidayakannya.

3. Perbaikan Lingkungan

Pada aspek ini melihat peran serta perusahaan dalam memberikan kontribusi berupa perbaikan lingkungan hidup masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan khususnya di Kecamatan Malili. Untuk melihat peran CSR PT Vale dalam perbaikan lingkungan maka dilakukan wawancara dengan informan staf Divisi Public Relation PT. Vale yang mengemukakan bahwa:

“dari PT VALE itu memberikan Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB) Dengan Aktivitas berupa Budidaya System of Rice Intensification (SRI) Organik, yang mencakup 198 petani di sembilan kecamatan di Kabupaten Luwu Timur dengan total lahan 83,9 hektar dan produksi 52 ton”
(Hasil wawancara Tanggal, 22 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perusahaan PT Vale menunjukkan kepedulian terhadap isu lingkungan salah satu caranya adalah memberikan Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB) Dengan Aktivitas berupa Budidaya *System of Rice Intensification* (SRI) Organik yang tidak menggunakan zat-zat kimia yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan, program ini menysasar sejumlah 98 petani yang ada di Luwu Timur termasuk di Kecamatan Malili.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Kepala Divisi Public Relation PT. Vale yang mengemukakan bahwa:

“Dari sisi pengelolaan lingkungan, perhatian terhadap persoalan lingkungan dilihat dari pengoperasian PLTA lebih ramah lingkungan daripada pembangkit listrik thermal sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK)”
(Hasil wawancara Tanggal, 23 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pengelolaan lingkungan yang dilakukan PT Vale tidak hanya memperhatikan permasalahan lingkungan secara lokal namun berkontribusi untuk perbaikan lingkungan secara global dengan upaya mengurangi emisi rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global.

Adapun pandangan informan Kasi Bidang Kesejahteraan Sosial Kecamatan Malili yang mengemukakan bahwa:

“Program 2018 itu sekarang sudah berbicara kawasan ada beberapa desa sesuai dengan wilayahnya mereka kawasan pesisir harapan dewan ri tasi-tasi palempang, merka itu program sementara yang jalan penanaman tembakau dengan pembangunan apartemen ikan mereka koordinasi dengan dinas kelautan dan perikanan itu kalau kawasan”
(Hasil wawancara Tanggal, 2 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat perubahan program pada tahun 2018 yang berorientasi pada kawasan sehingga pengelolaan lingkungan didasarkan pada kebutuhan kawasan seperti pembangunan apartemen ikan pada kawasan pesisir.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan masyarakat SS selaku tokoh masyarakat mengemukakan bahwa:

“kalau dari sisi lingkungan saya rasa memang yang perlu diperhatikan itu masalah budidaya yang baik bagi lingkungan yang dilakukan secara organik ini saya rasa sangat bagus kalau terus diperhatikan oleh pemerintah dan PT Vale sebagai mitra dalam kegiatan tersebut”
(Hasil wawancara Tanggal, 4 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa perhatian terhadap perbaikan lingkungan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat salah satu contohnya budidaya organik yang tidak menggunakan zat-zat kimia merupakan upaya perbaikan lingkungan yang bersifat preventif dan dapat dilakukan

secara berkelanjutan untuk perbaikan lingkungan yang lebih baik di wilayah Kecamatan Malili.

4. Memperkecil Konflik

Memperkecil konflik, mengupayakan usaha meminimalisir konflik yang terjadi tengah masyarakat sehingga tercipta keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat. Untuk memperoleh gambaran mengenai hal ini maka dilakukan wawancara dengan informan Kasi Bidang Kesejahteraan Sosial Kecamatan Malili yang mengemukakan bahwa:

“Bulan lalu itu ada sedikit demonstrasi aksi unjuk rasa di depan gerbang Mangkasa Point Milik PT. Vale Indonesia yang berada di Lampia tepatnya di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Aksi demonstrasi tersebut untuk dilakukan warga yang menuntut kejelasan status lahan”
(Hasil wawancara Tanggal, 2 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat konflik yang terjadi di Kecamatan Malili terkait kejelasan status lahan diperlukan upaya-upaya untuk meredam konflik yang terjadi. Penjelasan terkait konflik ini diuraikan oleh informan LA selaku tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa:

“lahan itu memang diperuntukkan agar dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai kompensasi lahan pengganti pembangunan Dam Karebbe, jadi ya kalau kita pikir wajar saja jika ada reaksi dari masyarakat karena justru ada pihak lain diluar warga sekitar yang masuk memanfaatkan lahan”
(Hasil wawancara Tanggal, 5 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat lahan yang seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bentuk kompensasi PT Vale dari pengganti pembangunan DAM Karebba. Reaksi masyarakat muncul setelah diketahui adanya pihak diluar wilayah warga yang ikut memanfaatkan lahan tersebut. Untuk mengetahui upaya pengurangan konflik tersebut maka dilakukan

wawancara dengan informan Kepala Divisi Public Relation PT. Vale yang mengemukakan bahwa:

“saya kira perusahaan bergerak secepatnya menyelesaikan proses penyerahan lahan tersebut kepada Pemerintah daerah untuk selanjutnya diberikan kepada warga. Jadi kita juga telah membuat tim khusus yang terdiri dari berbagai stakeholder untuk melakukan peninjauan lokasi dan pengosongan lahan”

(Hasil wawancara Tanggal, 22 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa upaya untuk menekan konflik dilakukan dengan inisiatif yang cukup cepat hal ini dapat dilihat dari pembentukan tim khusus yang bertugas untuk meninjau lokasi dan melakukan pengosongan lahan sehingga proses selanjutnya adalah penyerahan lahan dari PT. Vale kepada pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk diserahkan kepada masyarakat.

5. Kegiatan Budaya Masyarakat

Aspek ini menunjukkan dorongan untuk melestarikan warisan budaya serta menjaga iklim budaya masyarakat yang telah mengakar pada masyarakat sehingga terbangun ikatan emosional antara perusahaan dan masyarakat. Untuk memperoleh gambaran mengenai hal tersebut maka dilakukan wawancara dengan informan informan staf Divisi Public Relation PT. Vale yang mengemukakan bahwa:

“ini contohnya budaya yang kita adopsi itu seperti pada pembangunan Taman Raya Wallacea Sawerigading (TRWS) desainnya itu berupa daun pohon Welanreng dan penyertaan nama Sawerigading, menjadi bentuk penyertaan budaya maupun kearifan lokal sehingga akan makin menguatkan dukungan masyarakat terhadap pembangunan ekowisata lahan-lahan pascatambang”

(Hasil wawancara Tanggal, 23 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat upaya yang dilakukan PT Vale dalam mengadopsi kearifan lokal atau budaya setempat

seperti pada desain TRWS yang menyerupai daun Welanreng hal ini menampilkan ikon lokal yang tidak terpisahkan dari masyarakat Luwu Timur. Selanjutnya dukungan pada aspek budaya tidak hanya ditunjukkan secara simbolik tetapi dalam bentuk program nyata hal ini dikemukakan oleh informan Kepala Divisi Public Relation PT. Vale yang mengatakan bahwa:

“jadi kita itu pernah meluncurkan dua buku kumpulan cerita rakyat di Gedung Wanita Simpursiang, Malili. Dua buku yang diluncurkan yaitu Pelayaran Cinta Sawerigading & Cerita Rakyat Tana Luwu serta Batu Tikumba-kumba & Kisah-kisah Lain dari Tana Luwu yang ditulis oleh Tim Komunikasi PT Vale. Penerbitan buku tersebut merupakan bagian dari kegiatan PTPM PT. Vale pada bidang seni dan budaya. untuk menjaga adat, nilai budaya dan moral masyarakat”
(Hasil wawancara Tanggal, 23 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa untuk menjaga kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat dilakukan melalui kegiatan PTPM PT Vale dengan meluncurkan dua buku Cerita Rakyat yang memiliki pesan moral dan nilai budaya lokal.

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Malili yang menilai upaya kegiatan budaya masyarakat ini mendapat apresiasi hal ini diungkapkan oleh informan LA yang mengatakan bahwa:

“kalau dilihat dari upaya seni dan budaya ini kurang begitu menonjol dari program lain seperti kesehatan, pendidikan dan pembangunan lainnya namun juga perlu juga untuk diperhatikan karena kalau tidak ada budaya kita bisa kehilangan identitas lokal apalagi kan ini perusahaan asing yang kelola SDAny kita”
(Hasil wawancara Tanggal, 5 Agustus 2019)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan masyarakat SS yang mengemukakan bahwa:

“saya rasa itu contoh yang bagus kalau ingin budaya lokal tetap diingat masyarakat dibuatkan buku dongeng atau kisah-kisah itu bagus sekali untuk anak-anak namun secara keseluruhan saya lihat tidak begitu banyak perhatian untuk budaya lebih banyak ke upaya peningkatan perekonomian seperti itu apartemen ikan itu bagus sekali”
(Hasil wawancara Tanggal, 4 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pendekatan CSR pada aspek budaya masih minim dan terbatas hal ini dikarenakan prioritas program lebih banyak kepada program di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana prasarana umum, dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pelatihan. Namun upaya mengangkat nilai-nilai budaya lokal melalui buku dongeng mendapat apresiasi dari masyarakat.

Berdasarkan serangkaian hasil penelitian terkait Implementasi CSR Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur yang ditelusuri melalui 5 aspek yaitu (Susanto, 2009), yaitu Penyediaan Layanan Sosial, Peningkatan Profit Masyarakat, Perbaikan Lingkungan, Memperkecil Konflik, dan kegiatan budaya masyarakat. Pada aspek penyediaan pelayanan sosial menunjukkan bahwa terdapat upaya pelayanan sosial yang secara khusus pada bidang kesehatan yaitu dengan dibentuknya kelompok kerja yang melaksanakan program yang mencakup sosialisasi, pelatihan, dan kampanye pencegahan penularan dan penindakan HIV/AIDS dilingkungan PT Vale secara khusus dan lingkungan masyarakat di Kecamatan Malili secara umum. PT Vale mendukung pengembangan sarana kesehatan masyarakat antara lain Pustu (Puskesmas Pembantu dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang secara khusus bertujuan untuk menjamin kesehatan masyarakat miskin di Kecamatan Malili.

Layanan sosial dalam bidang pendidikan diperuntukan untuk PAUD (pendidikan anak usia dini) dimana target yang ingin dicapai adalah 1 desa satu PAUD pada 4 kecamatan pemberdayaan termasuk Kecamatan Malili. terjadi perubahan orientasi program pada tahun 2013-2017 menitikberatkan pada tiga bidang yaitu pendidikan, kesehatan, dan perekonomian namun pada tahun 2018 terjadi perubahan orientasi dimana program CSR mengikuti program pemerintah melalui pembagian kawasan yang terbagi dalam kawasan pelayanan jasa dan perkotaan dan kawasan pesisir. Pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat melalui sektor kesehatan dan pendidikan memberikan manfaat dan kemudahan kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Malili.

Pada aspek Peningkatan Profit /Usaha Masyarakat menunjukkan bahwa pemberian keterampilan kepada masyarakat dilakukan dengan melibatkan lembaga karang taruna yang berperan meningkatkan skill dan kecakapan kewirausahaan pemuda dalam meningkatkan peluang memperoleh lapangan kerja khususnya bagi pemuda yang ada di Kecamatan Malili. Terdapat kegiatan budidaya tanaman herbal yang diberikan pada 40 warga binaan yang memiliki 10 jenis minuman herbal produksi kelompok binaan yang memiliki izin merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat memperoleh bantuan kewirausahaan yang secara konkrit diwujudkan dengan pemberian bibit tanaman herbal yang dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat yang telah membudidayakannya.

Pada aspek perbaikan lingkungan menunjukkan bahwa perusahaan PT Vale menunjukkan kepedulian terhadap isu lingkungan salah satu caranya adalah memberikan Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB)

Dengan Aktivitas berupa Budidaya System of Rice Intensification (SRI) Organik yang tidak menggunakan zat-zat kimia yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan, program ini menyasar sejumlah 98 petani yang ada di Luwu Timur termasuk di Kecamatan Malili. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan PT Vale tidak hanya memperhatikan permasalahan lingkungan secara lokal namun berkontribusi untuk perbaikan lingkungan secara global dengan upaya mengurangi emisi rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global. Terdapat perubahan program pada tahun 2018 yang berorientasi pada kawasan sehingga pengelolaan lingkungan didasarkan pada kebutuhan kawasan seperti pembangunan apartemen ikan pada kawasan pesisir.

Perhatian terhadap perbaikan lingkungan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat salah satu contohnya budidaya organik yang tidak menggunakan zat-zat kimia merupakan upaya perbaikan lingkungan yang bersifat preventif dan dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk perbaikan lingkungan yang lebih baik di wilayah Kecamatan Malili.

Pada aspek upaya memperkecil konflik menunjukkan bahwa terdapat konflik yang terjadi di Kecamatan Malili terkait kejelasan status lahan diperlukan upaya-upaya untuk meredam konflik yang terjadi. Terdapat lahan yang seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bentuk kompensasi PT Vale dari pengganti pembangunan DAM Karebba. Reaksi masyarakat muncul setelah diketahui adanya pihak diluar wilayah warga yang ikut memanfaatkan lahan tersebut.

Upaya untuk menekan konflik dilakukan dengan inisiatif yang cukup cepat hal ini dapat dilihat dari pembentukan tim khusus yang bertugas untuk meninjau lokasi

dan melakukan pengosongan lahan sehingga proses selanjutnya adalah penyerahan lahan dari PT. Vale kepada pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk diserahkan kepada masyarakat.

Pada aspek kegiatan budaya masyarakat menunjukkan terdapat upaya yang dilakukan PT Vale dalam mengadopsi kearifan lokal atau budaya setempat seperti pada desain TRWS yang menyerupai daun Welanreng hal ini menampilkan ikon lokal yang tidak terpisahkan dari masyarakat Luwu Timur. Selanjutnya dukungan pada aspek budaya tidak hanya ditunjukkan secara simbolik tetapi dalam bentuk program nyata untuk menjaga kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat dilakukan melalui kegiatan PTPM PT Vale dengan meluncurkan dua buku Cerita Rakyat yang memiliki pesan moral dan nilai budaya lokal. pendekatan CSR pada aspek budaya masih minim dan terbatas hal ini dikarenakan prioritas program lebih banyak kepada program di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana prasarana umum, dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pelatihan. Namun upaya mengangkat nilai-nilai budaya lokal melalui buku dongeng mendapat apresiasi dari masyarakat setempat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi CSR Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur menunjukkan bahwa untuk aspek layanan sosial terjadi perubahan orientasi program pada tahun 2013-2017 menitikberatkan pada tiga bidang yaitu pendidikan, kesehatan, dan perekonomian ketiga bidang tersebut dilaksanakan dengan berbagai program yang kongkrit dirasakan oleh masyarakat namun pada tahun 2018 terjadi perubahan orientasi dimana program CSR mengikuti program pemerintah melalui pembagian kawasan. Pada aspek Peningkatan Profit /Usaha Masyarakat menunjukkan bahwa pemberian keterampilan kepada masyarakat dilakukan dengan melibatkan lembaga karang taruna. Terdapat kegiatan budidaya tanaman herbal dengan pemberian bibit tanaman herbal yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat yang telah membudidayakannya. Pada aspek perbaikan lingkungan menunjukkan bahwa adanya kepedulian terhadap isu lingkungan salah satu caranya adalah memberikan Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB) Dengan Aktivitas berupa Budidaya System of Rice Intensification (SRI) Organik dan tahun 2018 yang berorientasi pada kawasan sehingga pengelolaan lingkungan didasarkan pada kebutuhan kawasan seperti pembangunan apartemen ikan pada kawasan pesisir. Pada aspek upaya memperkecil konflik menunjukkan bahwa upaya untuk menekan konflik dilakukan dengan inisiatif yang cukup cepat hal ini dapat dilihat dari pembentukan tim khusus

yang bertugas untuk meninjau lokasi dan melakukan pengosongan lahan sehingga proses selanjutnya adalah penyerahan lahan dari PT. Vale kepada pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk diserahkan kepada masyarakat. Pada aspek kegiatan budaya masyarakat menunjukkan terdapat upaya yang dilakukan PT Vale dalam mengadopsi kearifan lokal atau budaya setempat seperti pada desain TRWS yang menyerupai daun Welanreng hal ini menampilkan ikon lokal yang tidak terpisahkan dari masyarakat Luwu Timur dan juga meluncurkan dua buku Cerita Rakyat yang memiliki pesan moral dan nilai budaya lokal. pendekatan CSR pada aspek budaya masih minim dan terbatas hal ini dikarenakan prioritas program lebih banyak kepada program di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana prasarana umum, dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pelatihan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan sosialisasi oleh PT Vale dan pemerintah mengenai program kerja CSR tahun 2018-2023 agar masyarakat dapat mengawasi dan memahami program kerja CSR sehingga penggunaan dana CSR dapat terserap maksimal untuk kebutuhan masyarakat.
2. Pemberian CSR mesti tetap menyentuh berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, perekonomian masyarakat meskipun orientasi berbasis kawasan namun pemerataan kebutuhan layanan sosial masyarakat masih memerlukan perhatian dari program CSR ini.

3. Pada aspek penyelesaian konflik mesti ditindaklanjuti secara cepat dan tepat karena masalah sosial yang lebih luas dapat terjadi jika penanganan konflik tidak efektif diselesaikan.
4. Aspek budaya masih sangat minim disentuh dalam program CSR penanaman nilai-nilai budaya lokal mesti dipikirkan bersama dalam program CSR dengan cara kreatif yang mudah merangkul kawula muda.



DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: CV Alfabeta.
- Azhery, Busyra. (2011). *Corporate Social Responsibility dari voluntary menjadi mandatory*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Farida, F. (2014). *Analisis Pengaruh Implementasi Csr Terhadap Kesejahteraan Sosial Di Bmt Harapan Umat Kudus*. IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(2), 357-378.
- Fox, T., H. Ward B., and Howard, (2002). *Public Sector Roles in Strengthening Corporate Social Responsibility: A Baseline Study*, The World Bank.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hadi, Nur. (2011). *Corporate Social Responsibility* edisi Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Lako, Andreas. (2011). *Dekontruksi CSR & Reformasi paradigm bisnis dan akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Mapisangka, A. (2009). *Implementasi CSR terhadap kesejahteraan hidup masyarakat*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (JESP), 1(1).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta
- Mulya Amri, Wicaksono Sarosa. (2008). *CSR Untuk Penguatan Kohesi Sosial, Edisi Kelima*. Indonesia Business Links: Jakarta.
- Moleong, L. J. (2012). *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nugroho. T.R. (2009). *Kebijakan Publik, Formulas, Implementasi dan Evaluasi*. Penerbit Gramedia. Jakarta.
- Nusantoro, E. (2017). *Optimalisasi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Lingkungan Bekerja*. Edukasi, 2(1).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Prastowo, Joko & Huda, Miftahul. (2011). *Corporate Social Responsibility, Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*. Yogyakarta: Samudera Biru.

- Rahayu, Iswiyati. (2014). *Implementasi Program Corporate Social Responsibility Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 1.
- Resturiyani, N., (2012), *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan*. Skripsi: Universitas Pasundan Bandung.
- Rhius, Lase. (2015). *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Desa Tanjung Kecamatan Cipunagara Kabupatensubang Provinsi Jawa Barat*. Jakarta: Bina Nusantara University.
- Setyawan, Salam Dharma. (2004). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Saputra, B., & Mahmudi, M. (2016). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 16(2).
- Setyono, J. (2015). *Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)*. MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6 (1), 25-40.
- Solihin, Ismail. (2008). *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability*. Jakarta: PT. Riau Andalan Pulp and Paper.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Yogyakarta : Alfabeta
- Susanto, A.B. (2009). *Reputation - Driven. Corporate Social Responsibility. Pendekatan Strategi Manajemen dalam CSR*. Esensi Erlangga Grup. Jakarta
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat.
- UNDP. (2007). *United Nations Development Programme: Indonesia*. Retrieved 24 May 2007. Sumber: <http://www.undp.or.id/mdg/index.asp>.
- Wibisono, Yusuf. (2007). *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Jakarta: PT Gramedia.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo

Zainuddin, S dan Suhandani, Eno. (2015). *Muzara'ah dan Kesejahteraan Masyarakat Luwu Timur*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, IAIN Palopo. ejournal.iainpalopo.ac.id.



DOKUMENTASI

Wawancara di PT. VALE



Wawancara di PT. VALE



Wawancara di Kecamatan Malili Luwu Timur



Foto Bersama Staf Pemerintahan Camat Malili